

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIF
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

LAILATUL HIKMAH
NIM. E20163023

Dosen Pembimbing :

Daru Anondo, S.E., M.SI.
NIP. 19750303 200901 1 009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2020**

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIF
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

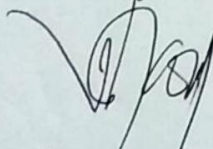
SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonom Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Lailatul Hikmah
NIM : E20163023

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo, S.E., M.Si.
NIP. 19750303 200901 1 009

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIF
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

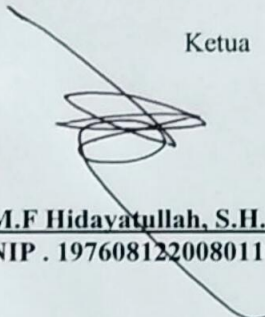
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2020

Tim Penguji

Ketua



M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP . 197608122008011015

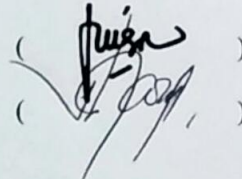
Sekretaris



Nur Alifah Fajarivah, SE., M.S.A.
NIP . 201603133

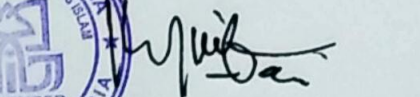
Anggota :

1. Dr. Khairunnisa Musari, ST., M.MT.
2. Daru Anondo, SE., M.Si.



Menyetujui
Dekan Fakultas dan Bisnis Islam




Dr. Hamdan Rifa'i, S.E., M. Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

Artinya : “Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa”. (Q.S. Al-An’am : 69).



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu dan Bapak tercinta (Sumiatun dan Suyitno) yang merupakan inspirasi utama dan beliau tiada hentinya membimbing, mendidik, menasehati, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Adik saya yang sangat saya sayangi (Ilham Akbar Maulana) yang telah memberikan semangat untuk menjadi orang yang lebih baik.
3. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2016 yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.
4. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Pandhalungan IAIN Jember, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
5. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini bisa menjadi bukti cinta dan bukan menjadi bukti perpisahan.
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua itu tentunya semata-mata karena Hidayah-Nya.

Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang penuh cakrawala pengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”** dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di IAIN Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan penulis tentu berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan hal itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di IAIN Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Jember dan selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi ini.
4. Semua pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Jember, 01 Maret 2020
Penulis

Lailatul Hikmah
NIM. E20163023

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Lailatul Hikmah, Daru Anondo, S.E., M.Si. 2020 : *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.*

Di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Rumuan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? (2) Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? (3) Apakah responsif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? (4) Apakah transparansi, akuntabilitas dan responsif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa (2)) untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (3)) untuk mengetahui pengaruh responsif terhadap pengelolaan keuangan desa (4)) untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif. Populasi penelitian yaitu warga Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 13.143 orang. Sedangkan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, berjumlah 100 orang. Alat analisis data berupa uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistics Versi 22.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel akuntabilitas dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,723 > 1,98498 t_{tabel}$. Variabel responsif dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,409 > 1,98498 t_{tabel}$. Berbeda dengan variabel transparansi yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa karena memiliki nilai signifikansi $0,460 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,742 < 1,98498 t_{tabel}$. Sedangkan secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif

terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 12,986 > 2,70 F_{tabel}$.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Responsif, Pengelolaan Keuangan Desa.



ABSTRACT

Lailatul Hikmah, Daru Anondo, SE, M.Si. 2020: *The Effect of Transparency, Accountability and Responsiveness on Village Financial Management in Kedungringin Village, Muncar District, Banyuwangi Regency.*

In the current era of reform and decentralization, *good governance* is a prerequisite for every government to realize the aspirations of the people and achieve the goals and ideals of the nation. The characteristics of the implementation of *good governance*, especially for the principles of transparency and financial accountability of government both central and regional, the change in the paradigm of the government from centralistic (centralized) to decentralized (regional autonomy) greatly affects the dynamics of the implementation of local government to realize *good governance*.

The problem formulas examined in this thesis are (1) Does transparency have a significant effect on village financial management in Kedungringin Village, Muncar District, Banyuwangi Regency? (2) Does accountability have a significant effect on village financial management in Kedungringin Village, Muncar District, Banyuwangi Regency? (3) Does responsiveness have a significant effect on village financial management in Kedungringin Village, Muncar District, Banyuwangi Regency? (4) Does transparency, accountability and responsiveness simultaneously have a significant effect on village financial management in Kedungringin Village, Muncar District, Banyuwangi Regency?

The purpose of this study are (1) to determine the effect of transparency on village financial management (2) to determine the effect of accountability on village financial management (3) to determine the effect of responsiveness on village financial management (4) to determine the effect of transparency, accountability and responsive to village financial management.

This study uses a quantitative approach to the type of descriptive statistical research. The research population is Kedungringin Village, Muncar District, Banyuwangi Regency with a total of 13,143 people. While sampling using *purposive sampling techniques*, amounting to 100 people. Data analysis tools in the form of data instrument test, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing with the help of the SPSS Statistics Version 22 program.

The results of this study can be concluded that partially the accountability and responsive variables have a significant or positive effect on village financial management. Accountability variable with a significance value of $0,000 < 0,05$ and $t_{\text{value of count}} 3,723 > 1,98498 t_{\text{table}}$. Responsive variable with a significance value of $0,018 < 0,05$ and $t_{\text{value of count}} 2,409 > 1,98498 t_{\text{table}}$. In contrast to the variable transparency effect but not significant to the financial management of the village, because it has a significance value of $0,460 > 0,05$ and $\text{value}_t - 0,742 < 1,98498 t_{\text{table}}$. While simultaneously the variables of transparency, accountability, and responsiveness have a significant or positive effect on village financial management with a significance value of $0,000 < 0,05$ and aF value of $\text{of}_{\text{calculated}} 12,986 > 2,70 F_{\text{table}}$.

Keywords : Transparency, Accountability, Responsiveness, Village Financial Management.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	13
G. Asumsi Penelitian	15
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	19

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
2. Populasi dan Sampel	19
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data	23
J. Sistematika Pembahasan	34
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	36
A. Penelitian Terdahulu	36
B. Kajian Teori	41
1. <i>Good Governance</i>	41
2. Transparansi	44
3. Akuntabilitas	46
4. Responsif.....	47
5. Desa.....	48
6. Pengelolaan Keuangan Desa	49
7. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	50
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data	56
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	58
D. Pembahasan.....	72

BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Surat Permohonan Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Kuesioner Penelitian
7. Data Hasil Kuesioner Penelitian
8. Peta Desa Kedungringin
9. Struktur Perangkat Desa Kedungringin
10. Susunan Keanggotaan PKK Desa Kedungringin
11. Struktur Organisas BPD Desa Kedungringin
12. Struktur Organisas LPMD Desa Kedungringin
13. Daftar Ketua RT / RW Desa Kedungringin
14. Rekapitan Hasil Pengisian Kuesioner
15. Hasil Output SPSS Statistics Versi 22
16. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muncar	8
Tabel 1.2	Indikator Variabel	12
Tabel 1.3	Kriteria Skala Likert.....	22
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	54
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	55
Tabel 3.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan di Desa	56
Tabel 3.5	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 3.6	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	57
Tabel 3.7	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	57
Tabel 3.8	Tabel Hasil Uji Validitas	58
Tabel 3.9	Tabel Hasil Uji Reliabilitas Transparansi	59
Tabel 3.10	Tabel Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas	60
Tabel 3.11	Tabel Hasil Uji Reliabilitas Responsif.....	60
Tabel 3.12	Tabel Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	61
Tabel 3.13	Tabel Hasil Uji Multikolinieritas	63
Tabel 3.14	Tabel Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda	66
Tabel 3.15	Tabel Hasil Uji t (Parsial)	68
Tabel 3.16	Tabel Uji F (Simultan).....	70
Tabel 3.17	Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Penelitian	15
Gambar 3.1	Hasil Uji Normalitas.....	61
Gambar 3.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.¹

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait

¹ Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta : Selemba Empat, 2007), 1.

pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang besar, di mana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran. Inilah kemudian yang melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa ini membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.² Karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat

² I Desa Nyoman Tri Wandari, Edy Sujaba, I Made Pradana Adi Puta, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng", *e-Journal SI Ak*, Vol 3 No. 1 (2015), 2.

maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).³

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan prinsip-prinsip *good governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan responsif dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat atau pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Responsif adalah kewajiban pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakatnya, mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Ketiga prinsip *good governance* tersebut sangat berpengaruh untuk terciptanya pengelolaan keuangan publik yang baik dan tepat sasaran.⁴

Sejalan dengan hal tersebut menteri dalam negeri mengeluarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

³ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2002) 183.

⁴ Weni Ultafiah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Patisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2017), 5.

Keuangan Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.⁵ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.⁶

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan terletak di ujung paling timur pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah

⁵ Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida, "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (2012), 10.

⁶ <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm.Permendagri.Lampiran.pdf.html>. (diakses pada 12 Oktober 2019)

5.782,50 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.603.630 jiwa dengan memiliki 189 desa, 28 kelurahan dan 25 kecamatan .⁷ Kas desa di Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat pada tahun 2019 ini, pasalnya Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diterima pemerintah desa kian meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Tahun 2019 Dana Desa yang diterima seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi meningkat sebesar 200 Miliar lebih dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya cair sebesar 167 Miliar. Sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 sebesar 161, 949 Miliar, sehingga jika ditotal alokasi keuangan untuk desa se Kabupaten Banyuwangi mencapai 400 Miliar yang akan disalurkan kepada 189 desa. Artinya, ada kenaikan dari tahun sebelumnya, pendapatan desa meningkat sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Bukan hanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang perlu dipertanggungjawabkan namun semua komponen yang terdapat dalam APBD juga perlu dipertanggungjawabkan.⁸

Dalam hal pengelolaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. Dalam Perbup No 17 Tahun 2016 Pasal 5 dijelaskan bahwa rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Formula.

⁷ <http://www.Banyuwangikab.go.id.html>. (diakses pada 10 Oktober 2019)

⁸ <https://kabarrakyat.id/apbn.dana.desa.banyuwangi/.html>. (diakses pada 12 Oktober 2019)

Dijelaskan di Pasal 6 bahwa besaran Alokasi Afirmasi ditentukan berdasarkan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan dijelaskan di Pasal 7 besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan bobot 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis. Besaran Dana Desa tersebut membuat para pengelola keuangan desa rawan untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut. Bukan hanya Dana Desa saja yang rawan untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan, dana yang lainpun dapat membuat para pengelola keuangan desa rawan melakukan penyimpangan terhadap pengelolaannya.⁹

Dikutip dari Timesindonesia.co.id ratusan desa di Banyuwangi terindikasi selewengkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Hal ini disampaikan aktivis sekaligus sekretaris Asosiasi Pengusaha Mineral (ASPAMIN) Banyuwangi, Josse Rudi. Dari hasil investasi sepanjang tahun 2018 dugaan penyelewengan dilakukan dengan berbagai modus. Mulai dari sistem perencanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dugaan pungutan liar (pungli), tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan di desa, pemalsuan tanda tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak ada BPD tetapi anggarannya bisa dicairkan, intervensi oknum kecamatan serta lainnya. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan diperlukan partisipatif, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan

⁹ [https://peraturan.bpk.go.id.Home.perbup.kab.banyuwangi.no.17.tahun.2016.html](https://peraturan.bpk.go.id/Home.perbup.kab.banyuwangi.no.17.tahun.2016.html). (diakses pada 25 September 2019)

desa. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa diwajibkan terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Prinsip transparan akan terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dimana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan dana yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kasus tersebut desa-desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi dapat bekerja secara hati-hati diantaranya adalah desa Kedungringin di Kecamatan Muncar yang juga mendapatkan kucuran Dana Desa. Kecamatan Muncar adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi dan memiliki luas wilayah 76,9 Km². Peneliti memilih desa Kedungringin kecamatan Muncar untuk dijadikan objek penelitian karena mempertimbangkan faktor geografis dan praktis. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Kedungringin kecamatan Muncar karena alasan tersebut.¹⁰

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muncar

No	Desa	Alokasi Dana Desa Tahun 2019	Persentase
----	------	------------------------------	------------

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Rosda, 2017), 86.

1	Kedungrejo	Rp 189.246.582,57	11,24%
2	Tembokrejo	Rp 183.571.748,65	10,91%
3	Kedungringin	Rp 183.347.787,39	10,89%
4	Wringin Putih	Rp 169.272.284,90	10,06%
5	Tambakrejo	Rp 167.893.928,95	9,97%
6	Kumendung	Rp 166.665.146,06	9,90%
7	Sumbersewu	Rp 157.206.823,99	9,34%
8	Tapanrejo	Rp 156.544.261,12	9,30%
9	Sumberberas	Rp 155.956.086,46	9,26%
10	Blambangan	Rp 153.744.038,26	9,13%
TOTAL		Rp 1.683.448.683,00	100,00%

Sumber : BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Banyuwangi tahun 2019

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apakah responsif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?
4. Apakah transparansi, akuntabilitas dan responsif secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
3. Untuk mengetahui pengaruh responsif terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsif pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bagi pemerintah desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar dan Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa.

4. Bagi masyarakat Desa Kedungringin Kecamatan Muncar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.¹¹ Adapun variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut :

a. Variabel bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah transparansi (x_1), akuntabilitas (x_2) dan responsif (x_3).

b. Variabel terikat (Y)

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karenanya adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa.

2. Indikator Variabel

Indikator variabel pada penelitian ini adalah :

Tabel 1.2
Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Transparansi (x_1)	Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. ¹²	1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Tahap Kejelasan dan kelengkapan 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
Akuntabilitas (x_2)	Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. ¹³ Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.	1. Pertanggungjawaban hukum 2. Pertanggungjawaban kinerja 3. Pertanggungjawaban program 4. Pertanggungjawaban kebijakan 5. Pertanggungjawaban finansial
Responsif (x_3)	Responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur	1. Kapabilitas 2. Loyalitas Profesional 3. Sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik

¹² https://www.academia.edu/Pengaruh_Transparansi_dan_Akuntabilitas_terhadap_Pengelolaan_Keuangan_Desa.html.

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), 21.

	pemerintah harus memiliki 2 (dua) etika yaitu etika individual dan sosial. ¹⁴	
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. ¹⁵	1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap Pelaporan 5. Tahap Pertanggungjawaban

Sumber : Data diolah

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.¹⁶ Dengan arti lain definisi operasional adalah penjabaran yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan sehingga pembaca tidak salah pemahaman dalam menafsirkan variabel-variabel yang sudah penulis cantumkan.

1. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan rancangan peraturan desa yang melibatkan unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang kemudian disusun oleh sekretaris desa yang kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan

¹⁴ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Yogyakarta : Penerbit Infest, 2016), 25.

¹⁵ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), 17.

¹⁶ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Perss, 2017), 38.

BPD, kemudian dievaluasi oleh bupati dan terakhir penetapan APBDes oleh kepala desa.¹⁷

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai ketaatan bendahara desa dalam melakukan penyusunan buku kas umum, kas pembantu pajak, dan buku bank serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai ketaatan kepala desa dalam melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai ketaatan kepala desa dalam melakukan penyampaian laporan

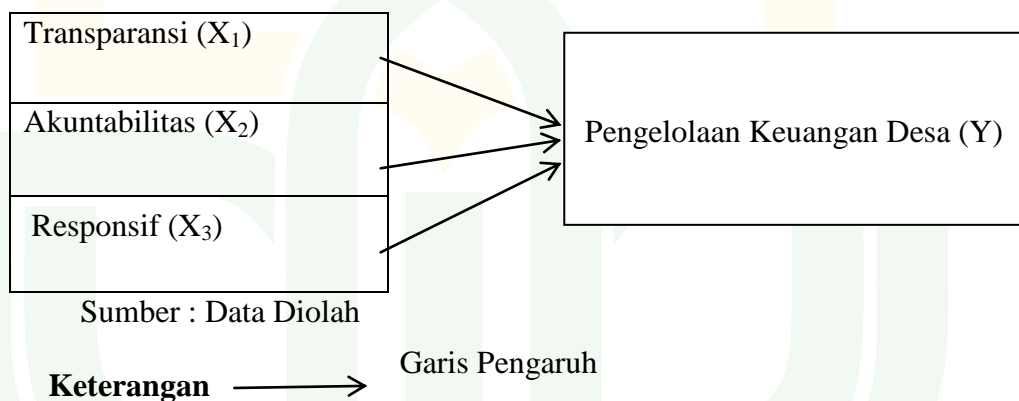
¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press, 2015), 31.

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran serta menginformasikannya kepada masyarakat.¹⁸

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian bisa disebut juga sebagai anggapan dasar, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.¹⁹ Asumsi penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Penelitian



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

¹⁸ Agus, Nurabiah dan Sri Pancawati, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Mataram, 2017.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 39.

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.²⁰

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” , hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh antara Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.²¹

Berdasarkan hasil penelitian Afrijal (2018) yang menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 99.

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), 30.

2. Pengaruh antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisien, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.²²

Berdasarkan hasil penelitian Afrijal (2018) yang menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

3. Pengaruh antara Responsif dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan

²² Ibid., 21.

masyarakat. Responsif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dimana aparat pemerintah desa menggunakan Dana Desa yang diterima untuk menangani persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Responsif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

4. Pengaruh antara Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Dari sembilan prinsip *Good Governance* yang telah disebutkan diatas peneliti mengambil tiga untuk dijadikan variabel yaitu transparansi, akuntabilitas dan responsif. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Responsif adalah kewajiban pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakatnya, mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Ketiga prinsip *good governance* tersebut sangat berpengaruh untuk terciptanya pengelolaan keuangan publik yang baik dan tepat sasaran

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Transparansi, Akuntabilitas dan responsif berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²³

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁴

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 15.

²⁴ *Ibid.*, 21.

kesimpulannya.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 13.143 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²⁶ Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Slovin, yaitu dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{13.143}{1+13.143 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{13.143}{1+13.143 (0,01)}$$

$$n = \frac{13.143}{132,43} = 99,3 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Perhitungan jumlah sampel tersebut menggunakan standar error sebesar 10%.²⁷ Hal tersebut dilakukan oleh peneliti karena peneliti mampu menunjukkan data yang relevan sebanyak 90%. Penentuan standar error tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah populasi

²⁵ Ibid., 130.

²⁶ Ibid., 131.

²⁷ Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs Lisreal : Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset* (Jakarta : Selemba Empat, 2011), 34.

yang akan diteliti. Selain itu peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena terbatasnya tenaga dan tidak memungkinkan pengambilan data secara keseluruhan. *Purposive Sampling* adalah sampling yang berisi orang khusus yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik mungkin orang itu satu-satunya yang punya informasi atau orang itu memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.²⁸

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Warga desa yang menjabat sebagai perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (KASI), dan (Kepala Urusan (KAUR).
- 2) Warga desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- 3) Warga desa yang menjabat di kepengurusan BPD, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

²⁸ Imam ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Semarang : Yoga Pratama, 2002), 140.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 145.

a. Kuesioner/ Angket

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya dan responden diminta untuk menjawabnya. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang sangat efisien jika digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau eksplanatori.³⁰

Untuk pemberian skor pada angket dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*. *Skala Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.³¹ Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *skala likert* sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kriteria Skala Likert

No	Keterangan	Simbol	Skor
1.	Sangat Setuju	SS	5
2.	Setuju	S	4
3.	Netral	N	3
4.	Tidak Setuju	TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Imam Ghazali (2002)

Penggunaan lima kategori dalam skala diatas dapat dipandang mewakili dengan baik tingkat intensitas penilaian responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuisisioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis.

³⁰ Imam Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Semarang : Yoga Pratama, 2002), 107.

³¹ Siregar, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Jakarta : BPFE, 2013), 67.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada semua responden secara langsung.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kuantitatif. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik inferensial. Statistik inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Penelitian inferensial digunakan karena peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga untuk lebih efisien penelitian dilakukan dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada.

Metode analisis statistik yang digunakan dalam statistik inferensial adalah T-test, Anova, Anacova, Analisis regresi, Analisis jalur dan metode analisis lain tergantung tujuan penelitian. Dalam statistik inferensial harus ada pengujian hipotesis yang bertujuan untuk melihat apakah ukuran statistik yang digunakan dapat ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas dalam populasinya. Dalam statistik inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 308.

tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang belaku umum. Metode ini juga disebut statistik induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja.³³

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 22 (*Statistical Product and Service Solution*) dengan menggunakan alat analisis data berupa uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Uji Instrumen Data

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa jauh instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.³⁴

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis item yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor

³³ Ibid., 229.

³⁴ Ibid., 193.

total yang merupakan jumlah dari skor tiap butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.

Adapun rumusan yang digunakan untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus korelasi. Hasil r_{hitung} kita bandingkan dengan r_{tabel} dimana $df = n-2$ dengan signifikan 2%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka valid dan sebaliknya.³⁵

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau uji kehandalan adalah uji konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner.³⁶ Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Secara matematik rumus *Cronbach Alpha* adalah :

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left(1 - \frac{\sum Si}{st} \right)$$

Keterangan :

r_{11} = Nilai reliabilitas

$\sum Si$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

St = Varians total

³⁵ V Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 192.

³⁶ Imam Ghazali, *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Semarang : Yoga Pratama, 2002), 147.

k = Jumlah item³⁷

Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama (konsisten).³⁸ Dalam penelitian ini cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 22. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuesioner $> 0,60$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya.

b. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksaan yang efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda maka perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.³⁹ Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan

³⁷ Ibid., 148.

³⁸ Riduan dan Sunarto, *Pengantar Statistika* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2009), 348.

³⁹ Ibid., 76.

penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.⁴⁰

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri kebawah kekanan atas. Distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *ploting*.⁴¹

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas.

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas. Untuk

⁴⁰ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan : Paradigma Positivisik dan Berbasis Pemecahan Masalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 77.

⁴¹ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2011), 69.

menguji gejala multikolinieritas dengan melihat nilai TOL dan VIF menggunakan aplikasi SPSS.⁴²

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.⁴³ Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan *nilai predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.⁴⁴

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

⁴² Ibid., 81.

⁴³ Ibid., 80.

⁴⁴ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2011), 95.

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.⁴⁵ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas dan responsif sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan keuangan desa. Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan keuangan desa

a = Konstanta

b_1 = Koefisien variabel transparansi

X_1 = Transparansi

B_2 = Koefisien variabel akuntabilitas

X_2 = Akuntabilitas

B_3 = Koefisien variabel responsif

X_3 = Responsif

e = eror

d. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka peneliti melakukan beberapa uji, yaitu uji t secara parsial, uji F secara simultan, serta Koefisien Determinasi (R^2).

⁴⁵ Algifari, *Analisis Statistik untuk Bisnis: dengan Regresi, Korelasi dan Nonparametrik* (Yogyakarta : BPFE, 1997), 79.

1) Analisis Uji t (Parsial)

Uji beda t -test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.⁴⁶ Uji t (parsial) digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval.⁴⁷ Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut :

a) Menentukan hipotesis

(1) $H_1 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_1 adalah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

$H_0 : b \neq 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah transparansi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

(2) $H_2 : b : 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_2 adalah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

$H_0 : b \neq 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah akuntabilitas tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

⁴⁶ Ibid., 98.

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 54.

(3) $H_3 : b = 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah responsif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

$H_0 : b \neq 0$ artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah responsif tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

(4) Menentukan derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0.05$) dari t_{hitung} dan t_{tabel} .

(5) Menentukan t_{hitung} dengan rumus :

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan :

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

(6) Menentukan t_{tabel} (diambil dari hasil tabel distribusi t pada $\alpha = 5\%$). Rumus $t_{tabel} = n - k$.

(7) Membuat kesimpulan : ‘

Kriteria uji t :

(a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, menyatakan bahwa variabel independen (x) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (y).

(b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (y).

2) Analisis Uji F (Simultan)

Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.⁴⁸ Hasil *F-test* ini pada *output* SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. Hasil *F-test* menunjukkan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, jika *P-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

Adapun langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut :

a) Menentukan hipotesis :

(1) $H_4 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ artinya secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa.

(2) $H_0 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ artinya secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu

⁴⁸ Ibid., 98.

transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa.

- b) Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 0.05$) dari F_{hitung} dan F_{tabel} .
- c) Menentukan F_{hitung} dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Keterangan :

F = Nilai F_{hitung}

R_2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Jumlah sampel

- d) Menentukan F_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%.

- e) Membuat kesimpulan :

(1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

(2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_4 ditolak, menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.⁴⁹

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.⁵⁰

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan definisi istilah.

⁴⁹ Ghozali, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2013), 95.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 42.

Bab II Kajian Kepustakaan

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III Penyajian Data dan Analisis Data

Hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan di akhiri dengan penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Sherly Gresita Apriliani (2013)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota tim pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat ⁵¹	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa	1. Pendekatan Penelitian 2. Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang transparansi dan responsif sedangkan penelitian sekarang membahas tentang transparansi dan responsif
2.	Risya Umami (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap	1. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan	1. Subjek penelitian 2. Penelitian sebelumnya

⁵¹ Sherly Gresita Apriliani, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2013).

		Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Jagamukti, Gunungsungging)	2. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa 3. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa ⁵²	desa 2. Jenis penelitian 3. Pendekatan penelitian 4. Teknik pengumpulan data	tidak membahas tentang responsif sedangkan penelitian sekarang membahas tentang responsif
3.	Johan Arief Indrajaya (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan laporan keuangan dana desa 2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa 3. Kompetensi dan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. ⁵³	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Metode pengumpulan data	1. Variabel penelitian
4.	Ulul Marzah (2017)	Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi sederhana, partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, transparan, dan keadilan. Hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa	1. Metode penelitian 2. Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang transparansi dan responsif sedangkan

⁵² Risyia Umami, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 6 Edisi 11 (2017).

⁵³ Johan Arief Indrajaya, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa", (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2017).

			<p>sebagaimana disebutkan diantaranya masyarakat kurang mendukung, rendahnya imbalan, pengabaian kepentingan individu, buruknya sistem akuntansi, dan kurang keinginan dari masyarakat dan pemerintah.⁵⁴</p>		<p>penelitian sekarang membahas tentang transparansi dan responsif</p>
5.	<p>Agus Wahyudi, Sri Pancawati dan M Nurabiah (2017)</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan baik.⁵⁵</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Jenis penelitian Deskriptif 3. Metode penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan metode pengumpulan data kuesioner 2. Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang transparansi dan responsif sedangkan penelitian

⁵⁴ Ulul Marzah, "Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2017).

⁵⁵ Agus Wahyudi, Sri Pancawati dan M. Nurabiah, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX* (2017).

					sekarang membahas tentang transparansi dan responsif
6.	Robiansyah Eka Pratama (2018)	Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat. ⁵⁶	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>	1. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitain kualitatif sedangkan metode penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kuantitatif
7.	Afrijal (2018)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan dana desa, transparansi tidak berhubungan positif dengan pengelolaan dana desa, dan secara parsial transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Penentuan sampel menggunakan metode slovin 3. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari	1. Teknik pengumpulan data penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sedangkan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan

⁵⁶ Robiansyah Eka Pratama, "Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2018).

			pengelolaan dana desa. ⁵⁷	penyebaran kuesioner langsung kepada responden	an teknik pengamatan observasi, wawancara dan kuesioner.
8.	Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G.Suharto (2018)	Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsif dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun belum maksimal. ⁵⁸	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> 3. Membahas variabel yang sama yaitu akuntabilitas, transparansi dan responsif	1. Metode penelitian 2. Teknik pengumpulan data
9.	Fitri Sukmawati (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%. ⁵⁹	1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Pendekatan penelitian	1. Penelitian sebelumnya menggunakan metode survey sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode pengumpulan data kuisisioner.

⁵⁷ Afrijal, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)", (Skripsi, Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, 2018).

⁵⁸ Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G.Suharto, "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi", *Jurnal Ilmiah Bisnis*, Volume 13 Nomor 1 (2018).

⁵⁹ Fitri Sukmawati, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)", *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, Volume 2 Nomor 1 (2019).

10.	Rika Ardiyanti (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. ⁶⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang pengelolaan keuangan desa 2. Penentuan sampel menggunakan metode slovin dan <i>purposive sampling</i> 3. Pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner langsung kepada responden 	1. Salah satu variabel yaitu responsif tidak dibahas dalam penelitian terdahulu
-----	-----------------------	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁶¹

⁶⁰ Rika Ardiyanti, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri WaliSongo, Semarang, 2019).

⁶¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), 18.

Good Governance adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁶²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintah yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintah tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

b. Karakteristik *Good Governance*

Karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi :

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

⁶²<http://ppid.lan.go.id/Keplan.No.540.Tahun.2001.Tentang.Pedoman.Penyelenggaraan.html>.
(diakses pada 15 Oktober 2019)

3) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consensus Orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic Vision*

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.⁶³

⁶³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), 18.

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu :

- 1) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- 2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
- 3) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).⁶⁴

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk

⁶⁴ Ibid., 30-31.

memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.⁶⁵

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Terdapat 6 (enam) prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi⁶⁶

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya

⁶⁵ Kristianten, *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), 50.

⁶⁶ <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/1985/1177>. (diakses pada 20 Oktober 2019)

- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.⁶⁷

c. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain :

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.⁶⁸

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan

⁶⁷ Didjaja, *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola* (Klaten : Cempaka Putih, 2013), 25.

⁶⁸ Kristianten, *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), 52.

prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisien, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan peraturan. Akuntabilitas hukum dari peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (compliance audit).⁶⁹

b. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator antara

lain :

- 1) Pertanggungjawaban hukum
- 2) Pertanggungjawaban kinerja
- 3) Pertanggungjawaban program
- 4) Pertanggungjawaban kebijakan
- 5) Pertanggungjawaban finansial⁷⁰

4. Responsif

Responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan

⁶⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), 21-23.

⁷⁰ Rasul, *Pembangunan Ekonomi Desa* (Bandung : Graha Ilmu, 2012), 82.

masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, yang menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Dalam upaya mewujudkan asas responsif sebagai asas fundamental menuju tatanan *good governance*, pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok marginal tersebut.⁷¹

5. Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

⁷¹ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Yogyakarta : Penerbit Infest, 2016), 25-26.

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷² Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.⁷³

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan

⁷² http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf. (Diakses pada 30 Januari 2020).

⁷³ Indra Bastian dkk, *Akuntansi Kecamatan dan Desa* (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2014), 2.53-2.54.

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.⁷⁴

Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (KASI), dan bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. KASI bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.⁷⁵

7. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

⁷⁴ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), 17.

⁷⁵ *Ibid.*, 30-33.

Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.⁷⁶



⁷⁶ Agus, Nurabiah dan Sri Pancawati, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* (2017), 8.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kedungringin

Desa Kedungringin adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Desa Kedungringin adalah desa yang diambil dari kata pohon beringin, dahulu ada sebuah danau yang cukup besar yang disampingnya dikelilingi oleh pohon yang disebut pohon ringin. Meskipun musim kemarau danau tersebut tetap saja tidak terjadi kekeringan air. Air didalam danau tersebut tetap terjaga. Tetapi pada suatu ketika ada musim kemarau yang sangat panjang, sehingga para penduduk terpaksa harus mengambil air dalam danau tersebut, lambat laun air dalam danau tersebut menjadi sumber kehidupan bagi para penduduk sekitar. Kemarau terjadi begitu panjang, penduduk terus menerus mengambil air dari danau tersebut sehingga menyebabkan air dalam danau tersebut kering dan dalam danau tersebut tumbuhlah pohon ringin. Jadi penduduk sekitar menamakan “Kedungringin” dan dijadikan sebuah desa yang diberi nama “Desa Kedungringin.

2. Kondisi Geografis Desa Kedungringin

Desa Kedungringin merupakan desa yang berada di dataran rendah dengan luas wilayah 246.972 ha/ m². Desa Kedungringin berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kedungrejo
- Sebelah Selatan : Desa Sumberberas
- Sebelah Timur : Teluk Pang-pang
- Sebelah Barat : Desa Tapan Rejo dan Tambak Rejo

Desa Kedungringin terbagi menjadi 3 dusun, 12 RW dan 40 RT.

Dusun yang ada di Desa Kedungringin yaitu Dusun Kedungringin, Dusun Tratas, dan Dusun Krajan.

3. Gambaran Demografis Desa Kedungringin

Secara umum Desa Kedungringin mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sebagian kecil merupakan penduduk pendatang, hal ini dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Kedungringin terdapat dua suku yaitu Jawa dan Madura.

Sesuai data sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk Desa Kedungringin sebesar 13.143 jiwa. Dari segi pendidikan yang ditempuh penduduk dan dari segi kepercayaan yang dianut dapat dipaparkan sesuai tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	58 orang	79 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Play group	207 orang	142 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	119 orang	176 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	612 orang	782 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	75 orang	217 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	507 orang	502 orang
7.	Tamat SD / Sederajat	1.319 orang	1.743 orang
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	716 orang	702 orang
9.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	64 orang	83 orang
10.	Tamat SMP / Sederajat	48 orang	51 orang

11.	Tamat SMA / Sederajat	42 orang	49 orang
12.	Tamat D1	68 orang	12 orang
13.	Tamat D2	65 orang	71 orang
14.	Tamat D3	25 orang	34 orang
15.	Tamat S1	67 orang	68 orang
16.	Tamat S2	10 orang	12 orang
Jumlah		4.002 orang	4.723 orang

Sumber : Profil Desa Kedungringin (2019)

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	6.402 orang	6.623 orang
2.	Kristen	52 orang	48 orang
3.	Katholik	6 orang	12 orang
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Khonghucu	-	-
7.	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
8.	Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-
Jumlah		6.460 orang	6.683 orang

Sumber : Profil Desa Kedungringin (2019)

4. Potensi Desa Kedungringin

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Kedungringin sebagian besar ada di sektor pertanian. Tanah di Desa Kedungringin sangat subur dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Persawahan di Desa Kedungringin seluas 180.650 ha/ m² dengan jenis sawah irigasi teknis seluas 150.150 ha/ m² dan sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis seluas 30.50 ha/ m².

b. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan potensi yang ada, terdapat beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh penduduk Desa Kedungringin. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kedungringin adalah

sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian penduduk Desa Kedungringin dapat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	363 orang	278 orang
2.	Buruh tani	1.801 orang	1.210 orang
3.	Buruh migran perempuan	21 orang	18 orang
4.	Buruh migran laki-laki	29 orang	36 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	11 orang	7 orang
6.	Pengrajin industri rumah tangga	48 orang	44 orang
7.	Pedagang keliling	14 orang	21 orang
8.	Nelayan	2.761 orang	-
9.	Perawat swasta	6 orang	3 orang
10.	Pembantu rumah tangga	12 orang	21 orang
11.	TNI	7 orang	-
12.	POLRI	5 orang	-
13.	Pensiun PNS/ TNI/ POLRI	4 orang	-
14.	Pengusaha kecil dan menengah	65 orang	21 orang
15.	Pengacara	2 orang	-
16.	Jasa pengobatan alternatif	1 orang	2 orang
17.	Pengusaha besar	7 orang	-
18.	Karyawan perusahaan pemerintah	520 orang	615 orang
19.	Makelar/ broker/ mediator	52 orang	5 orang
20.	Supir	46 orang	-
21.	Tukang becak	25 orang	-
22.	Tukang ojek	18 orang	-
23.	Tukang cukur	12 orang	-
24.	Tukang batu/ kayu	132 orang	-
Jumlah		5.962 orang	2.281 orang

Sumber : Profil Desa Kedungringin (2019)

B. Panyajian Data

Data dalam penelitian ini yaitu tentang “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” diperoleh dengan

cara peneliti menyebar kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi responden berdasarkan jabatan di pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan di Pemerintahan Desa

No	Jabatan	Frekuensi
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	KASI	2
4.	KAUR	3
5.	Kepala Dusun	3
6.	Ketua RT	40
7.	Ketua RW	12
8.	BPD	10
9.	PKK	16
10.	LPMD	12
Jumlah		100

Sumber : Data Diolah

2. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki-laki	69
2.	Perempuan	31
Jumlah		100

Sumber : Data Diolah

3. Klasifikasi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi
1.	16 – 25 tahun	8
2.	26 – 35 tahun	11
3.	36 – 45 tahun	38
4.	46 – 55 tahun	37
5.	56 – 65 tahun	5
6.	> 66 tahun	1
Jumlah		100

Sumber : Data Diolah

4. Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi
1.	SD	23
2.	SMP	39
3.	SMA / SMK	28
4.	Diploma	0
5.	S1	10
6.	S2	0
7.	S3	0
Jumlah		100

Sumber : Data Diolah

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $(N - 2)$, $N = 100$. Jadi $df = 100 - 2 = 98$ dengan α (alpha) 5% (0,05) didapat $r_{tabel} = 0,1654$. Jika

$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas menggunakan korelasi dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Uji Validitas

No	Variabel	Item Pernyataan	Alpha	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
1.	Transparansi (X1)	X1.1	0,05	0,1654	0,703	Valid
		X1.2			0,738	Valid
		X1.3			0,676	Valid
		X1.4			0,507	Valid
		X1.5			0,795	Valid
		X1.6			0,410	Valid
		X1.7			0,466	Valid
2.	Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,05	0,1654	0,489	Valid
		X2.2			0,608	Valid
		X2.3			0,380	Valid
		X2.4			0,435	Valid
		X2.5			0,655	Valid
		X2.6			0,572	Valid
		X2.7			0,473	Valid
3.	Responsif (X3)	X3.1	0,05	0,1654	0,689	Valid
		X3.2			0,624	Valid
		X3.3			0,680	Valid
		X3.4			0,605	Valid
		X3.5			0,609	Valid
		X3.6			0,384	Valid
		X3.7			0,301	Valid
4.	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y.1	0,05	0,1654	0,584	Valid
		Y.2			0,666	Valid
		Y.3			0,692	Valid
		Y.4			0,715	Valid
		Y.5			0,587	Valid
		Y.6			0,455	Valid
		Y.7			0,655	Valid

Sumber : Data Diolah (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam penelitian ini dikatakan valid karena $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$.

Dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

b. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Alat ukur untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka dikatakan reliabel dan sebaliknya.⁷⁷ Hasil pengujian masing-masing instrumen dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut :

1) Uji Reliabilitas Transparansi

Tabel 3.9
Hasil Uji Reliabilitas Transparansi (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	7

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,732 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari transparansi (X₁) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

⁷⁷ V Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*(Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 192.

2) Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Tabel 3.10
Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,628	7

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,628 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari akuntabilitas (X₂) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

3) Uji Reliabilitas Responsif

Tabel 3.11
Hasil Uji Reliabilitas Responsif (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,630	7

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,630 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari responsif (X₃) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4) Uji Reliabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3.12
Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,731	7

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,731 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari pengelolaan keuangan desa (Y) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksaan yang efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda maka perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi :

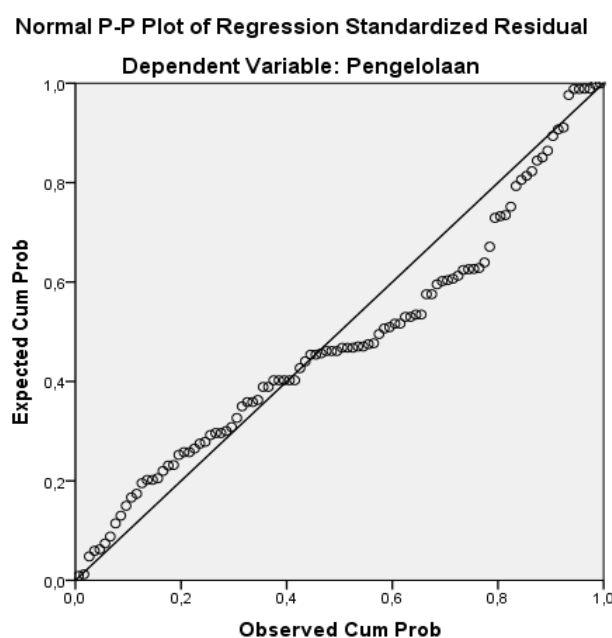
a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.⁷⁸

⁷⁸ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan : Paradigma Positivisik dan Berbasis Pemecahan Masalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 77.

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas.⁷⁹ Hasil uji normalitas data menggunakan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Dari tampilan grafik normal *plot*, terlihat titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

⁷⁹ Sulyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2011), 69.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.⁸⁰ Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,003		
Transparansi	,460	,753	1,327
Akuntabilitas	,000	,616	1,623
Responsif	,018	,744	1,344

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Sumber : Data Diolah (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji multikolinieritas model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, karena dapat dilihat dari nilai *Tolerance* pada masing-masing variabel bebas atau independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan perhitungan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing

⁸⁰ Ibid., 96.

variabel bebas kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

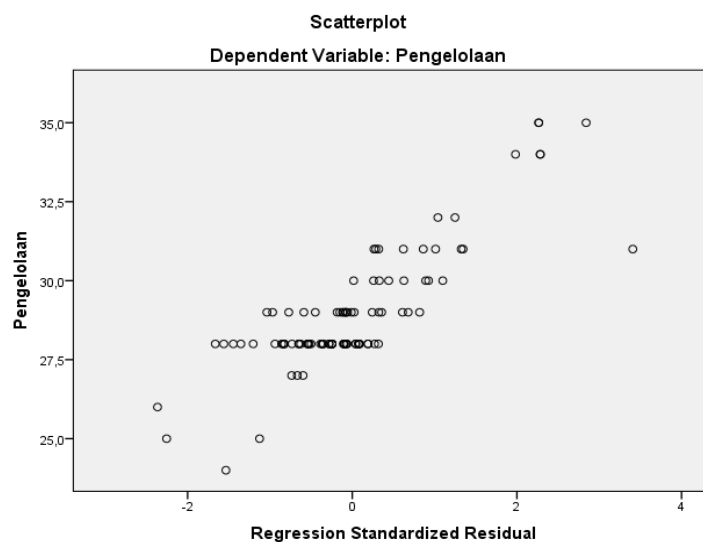
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.⁸¹ Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan *nilai predicated standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.⁸² Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸¹ Aminatus Zahriah, *Diklat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)*, (Jember : t.p, 2018), 78.

⁸²Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2011), 95.

Gambar 3.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas, dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul disatu tempat. Hal ini membuktikan tidak heterokedastisitas pada data dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.⁸³ Variabel bebas dari penelitian ini adalah transparansi (x_1), akuntabilitas (x_2), dan responsif (x_3). Sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan keuangan desa (y). Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

⁸³ Algifari, *Analisis Statistik untuk Bisnis: dengan Regresi, Korelasi dan Nonparametrik* (Yogyakarta : BPFE, 1997), 79.

Keterangan :

Y = Pengelolaan keuangan desa

a = Konstanta

b₁ = Koefisien variabel transparansi

X₁ = Transparansi

B₂ = Koefisien variabel akuntabilitas

X₂ = Akuntabilitas

B₃ = Koefisien variabel responsif

X₃ = Responsif

e = eror

Hasil dari analisis regresi berganda dengan bantuan *SPSS Statistics* versi 22 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,723	3,199		3,039	,003
	Transparansi	-,057	,077	-,074	-,742	,460
	Akuntabilitas	,477	,128	,408	3,723	,000
	Responsif	,248	,103	,240	2,409	,018

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data Diolah (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 9,723 - 0,057X_1 + 0,477X_2 + 0,248X_3 + e$$

a. Konstanta (α) = 9,723

Nilai konstanta dari persamaan diatas adalah sebesar 9,723 yang menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi, akuntabilitas dan responsif bernilai nol (sama dengan nol), maka pengelolaan keuangan desa sebesar 9,723.

b. Koefisien Transparansi = -0,057

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa adalah negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara kedua variabel. Jika transparansi dinaikkan satu satuan transparansi maka akan terjadi penurunan pada pengelolaan keuangan desa yang mengalami penurunan sebesar 0,057. Koefisien yang mempunyai nilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara pengungkapan transparansi dan pengelolaan keuangan desa.

c. Koefisien Akuntabilitas = 0,477

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa adalah positif. Jika akuntabilitas dinaikkan satu satuan akuntabilitas maka akan terjadi peningkatan pada pengelolaan keuangan desa sebesar 0,477. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa.

d. Responsif = 0,248

Pengaruh responsif terhadap pengelolaan keuangan desa adalah positif. Jika responsif dinaikkan satu satuan responsif maka akan terjadi peningkatan pada pengelolaan keuangan desa sebesar 0,248.

Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara responsif dan pengelolaan keuangan desa.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,723	3,199		3,039	,003
	Transparansi	-,057	,077	-,074	-,742	,460
	Akuntabilitas	,477	,128	,408	3,723	,000
	Responsif	,248	,103	,240	2,409	,018

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data Diolah (Terlampir)

Analisis uji t :

1) Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis :

H_1 : ada pengaruh signifikan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Transparansi (x_1) adalah sebesar $0,460 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,742 < t_{tabel}$ 1,98498, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan Transparansi (x_1) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (y).

2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis :

H_2 : ada pengaruh signifikan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Akuntabilitas (x_2) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,723 > t_{tabel}$ 1,98498, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan Akuntabilitas (x_2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (y).

3) Pengaruh Responsif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis :

H_3 : ada pengaruh signifikan Responsif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Responsif (x_3) adalah sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,409 > t_{tabel}$ 1,98498, maka dapat disimpulkan bahwa H_3

diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan Responsif (x_3) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (y).

b. Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106,760	3	35,587	12,986	,000 ^b
	Residual	263,080	96	2,740		
	Total	369,840	99			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Responsif, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS (Terlampir)

Dengan Hipotesis :

H_4 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (Transparansi, Akuntabilitas, Responsif) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Desa) secara simultan.

Berdasarkan hasil output diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 12,986 > F_{tabel} 2,70$, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (Transparansi, Akuntabilitas, Responsif) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Desa) secara simultan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.301	1.700

a. Predictors: (Constant), Responsif, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data Diolah (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) dari kebutuhan variabel memperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,301, yang memiliki arti bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsif berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 30,1%. Sedangkan untuk

sisanya sebesar 69,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi (x_1), akuntabilitas (x_2) dan responsif (x_3) terhadap pengelolaan keuangan desa (y), maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui 100 responden. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program SPSS *Statistics* Versi 22, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Transparansi (x_1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”, terbukti bahwa Transparansi mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel Transparansi (x_1) adalah sebesar $0,460 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,742 < 1,98498 t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Afrijal yang menyatakan bahwa Transparansi tidak berhubungan positif dengan pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kedungringin kurang terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang menjawab netral dan tidak setuju pada setiap item indikator pernyataan yang telah disediakan. Banyak responden mengakui bahwa pemerintah desa Kedungringin kurang terbuka mengenai pengelolaan keuangan desa hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penyediaan informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai program yang dilakukan dan anggarannya serta tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakan.

2. Pengaruh Akuntabilitas (x_2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa “Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”, terbukti bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (x_2) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,723 > 1,98498 t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Artinya, ada pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrijal yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dikuatkan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden pada setiap item indikator pernyataan yang telah disediakan. Adapun adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena

pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standart pelaporan.

3. Pengaruh Responsif (x_3) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Responsif berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”, terbukti responsif mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi diketahui nilai signifikansi variabel responsif (x_3) sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,409 > 1,98498 t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan Responsif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Responsif berpengaruh positif signifikan pada $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini mengindikasikan bahwa responsif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dikuatkan dengan banyaknya jawaban setuju dari responden. Adapun adanya pengaruh variabel responsif terhadap pengelolaan keuangan desa karena pemerintah desa sudah menjalankan pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat walaupun belum sesuai harapan pengguna layanan serta pemerintah desa juga menampung setiap aspirasi dan merespon setiap keluhan yang diadukan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo dan Didik G. Suharto (2018), penelitian

tersebut menyatakan bahwa responsif pemerintah desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan, namun belum sesuai dengan harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung oleh kepala desa untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa keluhan didengarkan, ditampung kemudian ditindaklanjuti, namun beberapa keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan.

4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (y)

Dengan uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan Desa, membuktikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 12,986 > 2,70 F_{tabel}$ yang artinya H_4 diterima. Jadi kesimpulannya adalah variabel Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa tingkat transparansi, akuntabilitas dan responsif tinggi, maka pengelolaan keuangan desa akan maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrijal yang meneliti variabel transparansi dan akuntabilitas menyatakan bahwa secara parsial transparansi dan akuntabilitas

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) yang dilaksanakan pada tahun 2018.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”** maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan ditolak. Artinya variabel transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan diterima. Artinya variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

3. Untuk pengaruh responsif terhadap pengelolaan keuangan desa memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan diterima. Artinya variabel responsif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
4. Berdasarkan pengujian simultan transparansi, akuntabilitas dan responsif memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti ada pengaruh signifikan antara transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Kedungringin

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada satu variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan pada saat dilakukan uji t (parsial) yaitu variabel transparansi. Mengacu pada hasil tersebut maka saran penulis kepada kepala Desa Kedungringin hendaknya memperhatikan hal ini. Mengingat transparansi ini merupakan variabel yang sangat penting dalam

menjalankan amanat masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mengendalikan pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Akademisi

Peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi keustakaan pihak kampus. Jika ada peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama, karena peneliti ini hanya menggunakan kuesioner atau angket, peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode selain kuesioner seperti *interview* dan metode lainnya agar mendapat informasi dari subjek, memperluas cakupan sampel dan populasi. Peneliti bisa menggunakan variabel-variabel lain dalam prinsip *good governance* yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algifari. 1997. *Analisis Statistik untuk Bisnis: dengan Regresi, Korelasi dan Nonparametrik*. Yogyakarta : BPFÉ.
- Bastian, Indra, dkk. 2014. *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Didjaja. 2013. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten : Cempaka Putih.
- Ghazali, Imam. 2002. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang : Yoga Pratama.
- Ghozali, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Erlangga.
- Kristianten. 2014. *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* . Surabaya: Rosda.
- Nordiawan. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Selemba Empat.
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Penerbit Infest.
- Rasul. 2012. *Pembangunan Ekonomi Desa*. Bandung : Graha Ilmu.
- Riduan, Sunarto. 2009. *Pengantar Statistika*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs Lisreal : Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Selemba Empat.
- Siregar. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Jakarta : BPFÉ.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : ANDI.

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan : Paradigma Positivisik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Zahriah, Aminatus. 2018. *Diklat Pengajaran Aplikasi Komputer Statistik (Teori dan Aplikasi dengan SPSS 22)*. Jember : t.p.

Jurnal dan Skripsi

Afrijal. 2018. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Mitra Indonesia: Bandar Lampung.

Agus, Nurabiah dan Sri Pancawati. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbaw*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.

Apriliani, Sherly Gresita. 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Jember: Jember.

Ardiyanti, Rika. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang.

Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Indrajaya, Johan Arief. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap*

Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung: Lampung.

Marzah, Ulul. 2017. *Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. IAIN Jember: Jember.

Pratama, Robiansyah Eka. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung: Lampung.

Setio Utomo, Kabul, Sudarmo, Didik G.Suharto. 2018. Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah Bisnis*. Volume 13 Nomor 1.

Sukmawati, Fitri. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*. Volume 2 Nomor 1.

Tri Wandari I Desa Nyoman, Edy Sujaba, I Made Pradana Adi Puta. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak*, Vol 3 No. 1.

Ultafiah, Weni. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah: Palembang.

Umami, Risyah. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *e-Jurnal Katalogis*. Volume 6 Edisi 11.

Website

<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm.Permendagri.Lampiran.pdf.html>.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.

<http://www.Banyuwangikab.go.id.html>.

<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/1985/1177>

<https://kabarrakyat.id/apbn.dana.desa.banyuwangi/.html>

https://www.academia.edu/Pengaruh_Transparansi_dan_Akuntabilitas_terhadap_Pengelolaan_Keuangan_Desa.html.

<http://ppid.lan.go.id/Keplan.No.540.Tahun.2001.Tentang.Pedoman.Penyelenggaraan.html>.

Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.

BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintha Desa) Banyuwangi tahun 2019

IAIN JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAILATUL HIKMAH
NIM : E20163023
Prodi / Jurusan : Akuntansi Syariah / Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”** adalah hasil penelitian / karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga dan / atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 20 Februari 2020
Saya yang menyatakan



Lailatul Hikmah
NIM : E20163023

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS	RUMUSAN MASALAH
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	1. Transparansi (x_1) 2. Akuntabilitas (x_2) 3. Responsif (x_3) 4. Pengelolaan Keuangan Desa (y)	1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Tahap Kejelasan dan kelengkapan 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 1. Pertanggungjawaban hukum 2. Pertanggungjawaban kinerja 3. Pertanggungjawaban program 4. Pertanggungjawaban kebijakan 5. Pertanggungjawaban finansial 1. Kapabilitas 2. Loyalitas Profesional 3. Sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap Pelaporan 5. Tahap Pertanggungjawaban	1. Sumber Data primer (menyebarkan kuesioner langsung kepada responden) 2. Studi Pustaka: a. Buku ilmiah b. Laporan penelitian c. Jurnal d. Skripsi e. Website	1. Pendekatan penelitian: kuantitatif 2. Jenis penelitian : analisis statistik deskriptif 3. Penentuan sampel : metode slovin dan <i>purposive sampling</i> 4. Metode analisis data: a. Uji Instrumen Data: 1) Uji validita 2) Uji realibilitas b. Uji asumsi klasik : 1) Uji Normalitas 2) Uji Multikolinieritas 3) Uji Heteroskedastisitas c. Analisis Regresi Linier Berganda d. Uji Hipotesis : 1) Analisis Uji t (Parsial) 2) Analisis Uji F (Simultan) 3) Uji Kofisien Determinasi (R^2)	1. H_1 : Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa 2. H_2 : Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa 3. H_3 : Responsif berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa 4. H_4 : Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa	1. Apakah transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ? 2. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ? 3. Apakah responsif berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ? 4. Apakah transparansi, akuntabilitas dan responsif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
LOKASI DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	20 Januari 2020	Mnyerahkan surat ijin penelitian	
2.	21 Januari 2020	Diterima penelitian	
3.	22 Januari 2020	Meminta profil data desa dan peta desa	
4.	22 - 31 Januari 2020	Menyebarkan kuesioner	
5.	24 Februari 2020	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Mengetahui

KEPALA DESA KEDUNGRINGIN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 01 /In.20/7.a/PP.00.9/01/2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Kedungringin Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Kepala Desa
Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk
memberikan izin penelitian bagi Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Lailatul hikmah
NIM : E20163023
Semester : VII
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No Telpn : 081216777482
Dosen Pembimbing : Daru Anondo, S.E., M.Si.
NIP : 19750303 200901 1 009
Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 06 Januari 2020
Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
DESA KEDUNGRINGIN
Jl. Turiman No 16 68472

Nomor : 005 / 09 / 429 - 511 - 09 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Kepala Desa Kedungringin

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LAILATUL HIKMAH
NIM : E20163023
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" terhitung tanggal 20 - 31 Januari 2020.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Muncar, 24 Februari 2020

KERALA DESA KEDUNGRINGIN



SUPARDI

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA/SMK
 D3 S1 S2
Lain-lain.....

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pada kuesioner ini Bapak/Ibu /Saudara/i diminta untuk memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang Bapak/Ibu /Saudara/i anggap sesuai.
2. Bapak/Ibu /Saudara/i dimohon hanya memberikan satu pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai/ mewakili situasi yang sebenarnya. Pilihlah jawaban untuk setiap pernyataan :
 - 1) Jika jawaban anda “Sangat Setuju” (SS)
 - 2) Jika jawaban anda “Setuju” (S)
 - 3) Jika jawaban anda “Netral” (N)
 - 4) Jika jawaban anda “Tidak Setuju” (TS)
 - 5) Jika jawaban anda “Sangat Tidak Setuju” (STS)

Kuesioner Transparansi (X₁)

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen					
	ketersediaan informasi yang berhubungan dengan dokumen dapat diketahui oleh masyarakat					
2.	Kejelasan dan Kelengkapan Informasi					
	Aksesibilitas yang berhubungan dengan dokumen mudah diketahui oleh masyarakat					
3.	Informasi mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program) oleh masyarakat					
4.	Adanya website atau media publikasi organisasi					
5.	Keterbukaan Proses					
	Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya					
6.	Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi					
	Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat					
7.	Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)					

Kuesioner Akuntabilitas (X₂)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Pertanggungjawaban Hukum					
	Akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat					
2.	Pertanggungjawaban Kinerja					
	Pertanggungjawaban kinerja telah melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien					

3.	Pertanggungjawaban Program					
	Program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program					
4.	Pertanggungjawaban Kebijakan					
	Adanya pertimbangan dalam membuat kebijakan – kebijakan yang akan dilakukan					
5.	Pertanggungjawaban Finansial					
	Adanya pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana desa secara ekonomis, efisien dan efektif					
6.	Adanya laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar					
7.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standart prosedur pelaksanaan					

Kuesioner Responsif (X₃)

Responsif berarti pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, yang menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Pernyataan Kapabilitas					
	Persoalan-persoalan masyarakat dilayani dengan sigap oleh pemerintah desa					
2.	Pemerintah desa menangani setiap keluhan masyarakat dengan sabar					
3.	Pemerintah desa merespon setiap keluhan masyarakat dengan cepat					
4.	Pernyataan Loyalitas Profesional					
	Pemerintah desa lebih mengutamakan aspirasi masyarakat dibandingkan beberapa kelompok tertentu					
5.	Pemerintah desa mengalokasikan keuangan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun					
6.	Pernyataan Sensitivitas Terhadap Berbagai Kebutuhan Publik					
	Pemerintah desa secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat					
7.	Setelah menampung persoalan-persoalan masyarakat pemerintah desa melahirkan					

	berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum					
--	---	--	--	--	--	--

Kuesioner Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa						
NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Pengelolaan Keuangan Desa					
	Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran					
2.	Perencanaan					
	Kegiatan perencanaan, dalam penyusunan APBDes yang ditetapkan telah sesuai dengan fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya					
3.	Pelaksanaan					
	Perencanaan dalam pemanfaatan ADD mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014					
4.	Penatausahaan					
	Penatausahaan keuangan desa memenuhi standart dalam peraturan Undang-Undang tentang desa					
5.	Pelaporan					
	Adanya laporan mengenai rincian dana penggunaan keuangan desa kepada masyarakat					
6.	Pertanggungjawaban Keuangan Desa					
	Adanya proses dan pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus					
7.	Asas-asas transparansi, akuntabel, responsif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran					

**PETA DESA KEDUNGRINGIN
KECAMATAN MUNCAR KAB. BANYUWANGI**



**STRUKTUR PERANGKAT DESA
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

Kepala Desa	: Supardi
Sekretaris Desa	: Bisri Musthofa
Kasi Kesejahteraan	: Fillios Tomy Suwarno Putra, S.Pi.
Kasi Pemerintahan	: Ahmad Sujoko, S.Tp.
Kaur Perencana	: Moh. Tajudin
Kaur Keuangan	: Tukiye
Kaur Umum	: Nur Hidayah
Kepala Dusun Tratas	: Hariyanto
Kepal Dusun Krajan	: Nurjaini
Kepala Dusun Kedungringin	: Rismanto

IAIN JEMBER

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PKK
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

Ketua PKK : Emsiyati
Sekretaris PKK : Nur Khamidah
Bendahara PKK : Sutiyani

Pokja (Kelompok Kerja) I :

1. Maryati
2. Lilik
3. Meswati

Pokja (Kelompok Kerja) II :

1. Aliya
2. Sulistiyowati
3. Destriyanti

Pokja (Kelompok Kerja) III :

1. Suhartini
2. Istianah
3. Paini

Pokja (Kelompok Kerja) IV :

1. Sugiyati
2. Liswatin
3. Holilah
4. Dewi Karniasih

IAIN JEMBER

**STRUKTUR ORGANISASI BPD
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

Ketua BPD : Moh. Syafi'i

Wakil Ketua BPD : Koirul Ikhwan

Sekretaris BPD : Mariyati

Anggota BPD :

1. I Putu Indra Setiawan
2. Moh Soleh
3. Nisyanto
4. Nur Khoiri
5. Samsul Hadi
6. Ruba'i

Staf BPD : Morina Puspitasari

IAIN JEMBER

**STRUKTUR ORGANISASI LPMD
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

Ketua LPMD	: Poniran
Wakil Ketua LPMD	: Jirman Huri
Sekretaris LPMD	: Warnanto
Bendahara LPMD	: Nurjanah
Seksi Bidang Keagamaan	: Sodik
Seksi Bidang Organisasi & Kemitraan	: Sukron
Seksi Bidang Keamanan & Ketertiban	: Slamet
Seksi Bidang Pendidikan dan Keterampilan	: Mugiman
Seksi Bidang Pemberdayaan & Lingkungan Hidup	: Soheh
Seksi Bidang Pemuda, Olahraga & Seni Budaya	: Hamdan
Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial	: Samsul
Seksi Bidang Kesehatan & Kependudukan	: Hilal

IAIN JEMBER

**DAFTAR KETUA RT DAN RW
DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

NO	NAMA	RT / RW	DUSUN
1.	Hadi	Ketua RW 01	Tratas
2.	Sugiman	Ketua RT 01	Tratas
3.	Jumaidah	Ketua RT 02	Tratas
4.	Fatoni Yusuf	Ketua RW 02	Tratas
5.	Seniri	Ketua RT 01	Tratas
6.	Suparmo	Ketua RT 02	Tratas
7.	Sudarsono	Ketua RT 03	Tratas
8.	Baedowi	Ketua RT 04	Tratas
9.	Matori	Ketua RW 03	Tratas
10.	Kamal	Ketua RT 01	Tratas
11.	Kasto	Ketua RW 04	Tratas
12.	Junaidi	Ketua RT 02	Tratas
13.	Rudi	Ketua RT 03	Tratas
14.	Holila	Ketua RW 05	Tratas
15.	Eko Prasetyo	Ketua RT 01	Tratas
16.	Adi Susilo	Ketua RT 02	Tratas
17.	Slamet	Ketua RT 03	Tratas
18.	Qomari	Ketua RT 04	Tratas
19.	Yasin	Ketua RW 09	Krajan
20.	Munjin	Ketua RT 01	Krajan
21.	Tamun	Ketua RT 02	Krajan
22.	Saptono	Ketua RT 03	Krajan
23.	Suhadi	Ketua RT 04	Krajan
24.	Poniran	Ketua RT 05	Krajan
25.	Sahid	Ketua RW 10	Krajan
26.	Elis	Ketua RT 01	Krajan
27.	Sutejo	Ketua RT 02	Krajan
28.	Markonah	Ketua RT 03	Krajan
29.	Muklis	Ketua RT 04	Krajan
30.	Jumadi	Ketua RT 05	Krajan
31.	Supingi	Ketua RW 11	Kedungringin
32.	Muh Jaini	Ketua RT 01	Kedungringin
33.	Nyono	Ketua RT 02	Kedungringin
34.	Lianita Ana Suprpto	Ketua RT 03	Kedungringin
35.	Maki	Ketua RW 12	Kedungringin
36.	Unggul Prabowo	Ketua RT 01	Kedungringin
37.	Boyamin	Ketua RT 02	Kedungringin
38.	Kasiyanto	Ketua RT 03	Kedungringin
39.	Sugianto	Ketua RW 13	Kedungringin
40.	Nur Hasan	Ketua RT 01	Kedungringin

41.	Hariyok	Ketua RT 02	Kedungringin
42.	Misnan	Ketua RT 03	Kedungringin
43.	Basiran	Ketua RW 14	Kedungringin
44.	Kartini	Ketua RT 01	Kedungringin
45.	Suparman	Ketua RT 02	Kedungringin
46.	Siti Munawaroh	Ketua RT 03	Kedungringin
47.	Hadi Arfan	Ketua RW 15	Kedungringin
48.	Sunatis	Ketua RT 01	Kedungringin
49.	Nur Jaini	Ketua RT 02	Kedungringin
50.	Siti Masruroh	Ketua RT 03	Kedungringin
51.	Munadi	Ketua RT 04	Kedungringin
52.	Zaenal Arifin	Ketua RT 05	Kedungringin

Rekapan Hasil Pengisian Kuesioner

a. Pernyataan Responden Terhadap Variabel X_1

No	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1.	1	0	6	83	10	100
2.	1	1	1	92	5	100
3.	1	1	6	70	22	100
4.	2	0	6	77	15	100
5.	1	1	12	62	24	100
6.	0	0	11	73	16	100
7.	0	1	4	77	18	100

b. Pernyataan Responden Terhadap Variabel X_2

No	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1.	0	0	3	78	19	100
2.	0	0	2	87	11	100
3.	0	1	7	83	9	100
4.	0	0	4	78	18	100
5.	0	0	5	69	26	100
6.	0	0	10	71	19	100
7.	0	0	6	79	15	100

c. Pernyataan Responden Terhadap Variabel X_3

No	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1.	0	0	4	75	21	100
2.	0	0	3	82	15	100
3.	0	0	7	80	13	100
4.	0	0	11	66	23	100

5.	0	0	10	67	23	100
6.	0	0	8	76	16	100
7.	0	0	2	84	14	100

d. Pernyataan Responden Terhadap Variabel Y

No	STS	TS	N	S	SS	Jumlah
1.	1	0	1	81	17	100
2.	0	0	3	87	10	100
3.	0	0	4	78	18	100
4.	0	0	5	76	19	100
5.	0	0	6	71	23	100
6.	0	0	1	83	16	100
7.	0	0	2	80	18	100

Hasil Output SPSS *Statistics* Versi 22

Tabel Distribusi Frekuensi

a. Transparansi (X_1)

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1,0	1,0	1,0
N	6	6,0	6,0	7,0
S	83	83,0	83,0	90,0
SS	10	10,0	10,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	1	1,0	1,0	2,0
N	1	1,0	1,0	3,0
S	92	92,0	92,0	95,0
SS	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1,0	1,0	1,0

TS	1	1,0	1,0	2,0
N	6	6,0	6,0	8,0
S	70	70,0	70,0	78,0
SS	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,0	2,0	2,0
	N	6	6,0	6,0	8,0
	S	77	77,0	77,0	85,0
	SS	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	1	1,0	1,0	2,0
	N	12	12,0	12,0	14,0
	S	62	62,0	62,0	76,0
	SS	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	11	11,0	11,0	11,0
	S	73	73,0	73,0	84,0
	SS	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	N	4	4,0	4,0	5,0
	S	77	77,0	77,0	82,0
	SS	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

b. Akuntabilitas (X₂)

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	3,0	3,0	3,0
	S	78	78,0	78,0	81,0
	SS	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	2,0	2,0	2,0
	S	87	87,0	87,0	89,0
	SS	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	N	7	7,0	7,0	8,0
	S	83	83,0	83,0	91,0
	SS	9	9,0	9,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	4,0	4,0	4,0
	S	78	78,0	78,0	82,0
	SS	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	5,0	5,0	5,0
	S	69	69,0	69,0	74,0

SS	26	26,0	26,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	10	10,0	10,0	10,0
S	71	71,0	71,0	81,0
SS	19	19,0	19,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	6	6,0	6,0	6,0
S	79	79,0	79,0	85,0
SS	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

c. Responsif (X₃)

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	4	4,0	4,0	4,0
S	75	75,0	75,0	79,0
SS	21	21,0	21,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	3	3,0	3,0	3,0
S	82	82,0	82,0	85,0
SS	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid N	7	7,0	7,0	7,0
S	80	80,0	80,0	87,0
SS	13	13,0	13,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	11	11,0	11,0	11,0
S	66	66,0	66,0	77,0
SS	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	10	10,0	10,0	10,0
S	67	67,0	67,0	77,0
SS	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	8	8,0	8,0	8,0
S	76	76,0	76,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X3.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	2	2,0	2,0	2,0
S	84	84,0	84,0	86,0
SS	14	14,0	14,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

d. Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	N	1	1,0	1,0	2,0
	S	81	81,0	81,0	83,0
	SS	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	3,0	3,0	3,0
	S	87	87,0	87,0	90,0
	SS	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	4,0	4,0	4,0
	S	78	78,0	78,0	82,0
	SS	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	5,0	5,0	5,0
	S	76	76,0	76,0	81,0
	SS	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	6,0	6,0	6,0
	S	71	71,0	71,0	77,0
	SS	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	1	1,0	1,0	1,0
S	83	83,0	83,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	2	2,0	2,0	2,0
S	80	80,0	80,0	82,0
SS	18	18,0	18,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Hasil Output SPSS Statistics Versi 22

Uji Reliabilitas

a. Transparansi (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24,37	4,538	,582	,672
X1.2	24,39	4,624	,648	,667
X1.3	24,27	4,320	,498	,687
X1.4	24,35	4,775	,317	,734
X1.5	24,31	3,772	,653	,641
X1.6	24,33	5,254	,215	,748
X1.7	24,26	5,144	,285	,734

b. Akuntabilitas (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,628	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Item Variance	Corrected if Item Deleted	Correlation	Cronbach's Alpha if Deleted
X2.1	23,98	2,585	,347	,589	
X2.2	24,00	2,667	,470	,564	
X2.3	24,16	2,802	,245	,619	
X2.4	24,06	2,643	,296	,606	
X2.5	24,06	2,198	,499	,530	
X2.6	24,12	2,491	,328	,598	
X2.7	24,04	2,847	,230	,623	

c. Responsif (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,630	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Item Variance	Corrected if Item Deleted	Correlation	Cronbach's Alpha if Deleted
X3.1	24,63	2,518	,516	,536	
X3.2	24,68	2,725	,461	,561	
X3.3	24,74	2,578	,516	,540	
X3.4	24,68	2,543	,352	,592	
X3.5	24,67	2,547	,363	,587	
X3.6	24,72	3,052	,134	,657	
X3.7	24,68	3,230	,100	,654	

d. Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,731	7

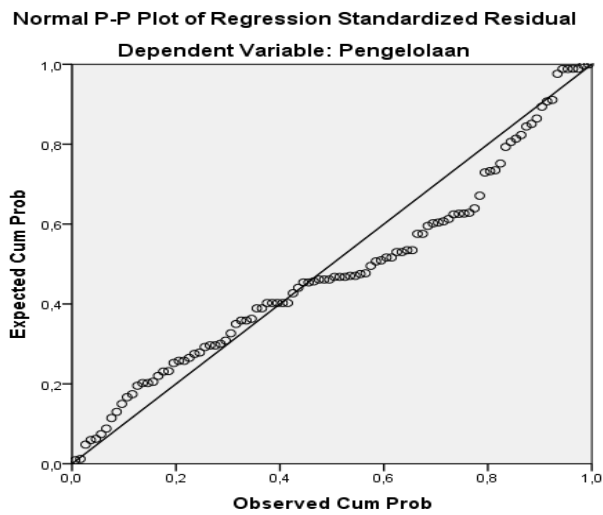
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	24,83	2,850	,369	,720
Y.2	24,89	2,947	,542	,683
Y.3	24,82	2,735	,537	,676
Y.4	24,82	2,654	,559	,670
Y.5	24,79	2,834	,369	,721
Y.6	24,81	3,206	,275	,733
Y.7	24,80	2,848	,502	,686

Hasil Output SPSS Statistics Versi 22

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinieritas

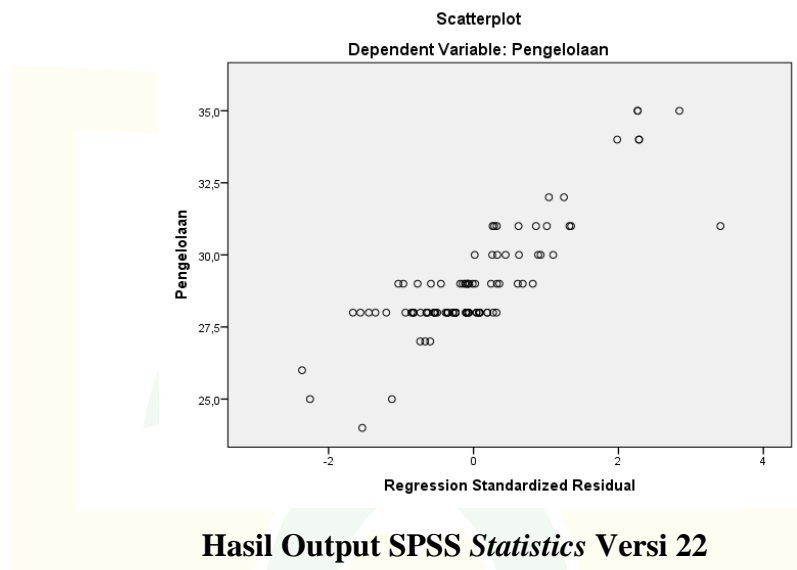
Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,003		

Transparansi	,460	,753	1,327
Akuntabilitas	,000	,616	1,623
Responsif	,018	,744	1,344

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

c. Uji Heteroskedastisitas



Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,723	3,199		3,039	,003
	Transparansi	-,057	,077	-,074	-,742	,460
	Akuntabilitas	,477	,128	,408	3,723	,000
	Responsif	,248	,103	,240	2,409	,018

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil Output SPSS Statistics Versi 22

Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,723	3,199		3,039	,003

Transparansi	-,057	,077	-,074	-,742	,460
Akuntabilitas	,477	,128	,408	3,723	,000
Responsif	,248	,103	,240	2,409	,018

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Uji f (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106,760	3	35,587	12,986	,000 ^b
	Residual	263,080	96	2,740		
	Total	369,840	99			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Responsif, Transparansi, Akuntabilitas

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,570 ^a	,325	,301	1.700

a. Predictors: (Constant), Responsif, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : **Lailatul Hikmah**
NIM : E20163023
Tempat, Tanggal : Banyuwangi, 04 Juni 1998
Alamat : Dsn. Kedungringin RT/RW 002/012 Ds. Kedungringin
Kec. Muncar – Kab. Banyuwangi
No. Hp : 081216777482
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan :

No	Institusi Pendidikan	Tahun
1.	TK Khadijah 116	2002 - 2004
2.	SDN 5 Sumberberas	2004 – 2010
3.	SMPN 1 Muncar	2010 – 2013
4.	SMKN Darul Ulum Muncar	2013 – 2016
5.	IAIN Jember	2016 - 2020